

LAPORAN POKOK-POKOK KESIMPULAN

RAPAT PANSUS RPJMD DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Pertemuan II – Jum'at, 23 Mei 2025

Tempat: Ruang Banggar DPRD Kab. Luwu Timur | Waktu: 10.00–17.20 WITA

A. UMUM

Rapat Pansus RPJMD Pertemuan II dilaksanakan dalam rangka:

1. Mengkaji secara komprehensif kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan 113 program Bupati terpilih, khususnya 5 program unggulan (Tiga Kartu Sakti, BKK 2 Miliar per Desa, Pupuk Gratis Plus).
2. Menuntaskan kelengkapan data dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang belum rampung pada rapat sebelumnya.

B. POKOK-POKOK KESIMPULAN

1. Kapasitas Fiskal dan Sumber Pembiayaan Program Prioritas

- Dibutuhkan tambahan anggaran minimal Rp 680 miliar untuk pelaksanaan program unggulan Bupati terpilih.
- Proyeksi total pendapatan daerah hingga 2029 sebesar Rp 3,1 triliun, bersumber dari:
 - PT Vale Indonesia: Potensi kontribusi Rp 112 miliar di tahun 2026 dari 2,5% laba bersih (dari Rp 4,5 triliun).
 - Deviden BUMD Luwu Timur Gemilang (LTG): mulai diproyeksikan pada tahun 2028.
 - Deviden Bank Sulselbar: Pemda Luwu Timur sebagai pemilik saham 6,2% - 8%, proyeksi penerimaan Rp 52-53 miliar per tahun.
 - Penerimaan hibah dan royalti: termasuk hibah listrik, slag nikel (bernilai Rp 120 miliar per tahun), dan scrub tambang.
 - Retribusi PBG dan pendapatan lainnya (limbah sawit, kayu, chipping, reject tambang golongan C).
 - Sumber-sumber kecil namun signifikan perlu tetap dikelola (retribusi, pendirian kantor perusahaan, dll).

2. Program Kartu Sehat

- Target cakupan: seluruh penduduk ber-KTP Luwu Timur, serta fleksibilitas bagi pelajar luar daerah yang bersekolah di Lutim.
- Anggaran diperlukan: Rp 61 miliar (sudah tersedia Rp 58 miliar di APBD 2025; kekurangan Rp 3 miliar).
- Fungsi Kartu Sehat:
 - Menanggung 21 jenis layanan kesehatan yang tidak dicakup BPJS.
 - Menjadi jaminan layanan gratis di RSUD Ilagaligo dan Rumah Sakit rujukan.
- Catatan teknis dan kebijakan:
 - Tidak berlaku jika BPJS nonaktif.
 - Perlu distribusi merata dan penyederhanaan birokrasi layanan.
 - Harus mengantisipasi lonjakan pasien, baik dari warga dalam maupun luar daerah.
 - Penting memastikan kesiapan SDM dan sarana RSUD, termasuk alat kesehatan dan obat non-generik.

- Diharapkan tidak menyalahi aturan perundangan di atasnya terkait jaminan kesehatan.

3. Kondisi dan Rencana RSUD Ilagaligo

- Utang RSUD telah ditekan dari Rp 25 miliar menjadi Rp 8 miliar.
- Proyeksi pendapatan 2025: Rp 81 miliar (sumber utama: klaim BPJS).
- Kekurangan dokter spesialis dan sarana tempat tidur (baru 200 dari ideal 300 unit).
- RSUD Ilagaligo menopang 3 - 4 kabupaten (termasuk Morowali dan Poso).
- Rencana jangka pendek:
 - Konsisten membuka layanan lebih pagi.
 - Penguatan SISFO (pendaftaran online, digitalisasi layanan).
 - Pengadaan alat pengolahan limbah medis (biaya saat ini: Rp 900 juta per bulan; estimasi pembelian alat pengolah limbah medis = Rp 2,5 miliar).
- Dorongan untuk peningkatan layanan unggulan: NICU, PICU, hematologi, onkologi, serta promosi dan peningkatan citra pelayanan RSUD.

4. Proyeksi dan Arah Bisnis BUMD Luwu Timur Gemilang (LTG)

- Fokus pada sektor pertambangan (3 blok IUP eksplorasi) dan sektor jasa (misal: pemasok batubara PT Vale Indonesia).
- Proyeksi pendapatan dari jasa batubara bisa mencapai Rp 50 miliar per tahun.
- Modal awal Rp 5 miliar dari Pemda belum digunakan, masih dalam tahap penyusunan RKA dan Renbis.
- Tantangan dan catatan penting:
 - Harus segera menyampaikan proyeksi pendapatan dan skema kerja.
 - Perlu jaminan bahwa aktivitas BUMD tidak mematikan pengusaha lokal.
 - Komunikasi intensif dengan PT Vale Indonesia dan jaringan nasional terus diupayakan.
 - DPRD mendorong kerja profesional, modern, dan transparan.

5. Masukan Strategis untuk Bapenda

- Perluasan kran pendapatan perlu dilakukan, tidak hanya mengandalkan PT Vale Indonesia.
- Pendekatan integratif terhadap potensi ekonomi: peternakan, pabrik beras, panen tiga kali setahun, dan Bandara Maliwowo.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait perpajakan (PBG), serta upaya maksimal menagih utang Pemprov (Rp 118 miliar) dan Pusat (DBH 2023).
- Strategi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dinilai akan berdampak positif pada pertumbuhan fiskal daerah.

C. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ketua Pansus pada pukul 17.20 WITA dengan penekanan bahwa keberhasilan RPJMD Luwu Timur 2025 - 2029 bergantung pada kekuatan regulasi, kesiapan fiskal, dan kemauan politik seluruh pihak untuk bersinergi secara optimal.